

**ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai,
Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

SOFYAN EKA SANDI

NPM : 1351010127

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak.

Pembimbing II : Fatih Fuadi, S.E., M.S.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar terciptanya sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu program yang ditujukan oleh pemerintah untuk menyentuh langsung masyarakat miskin adalah program keluarga harapan yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan secara tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang bertujuan untuk membangun melenium dimana di dalamnya termasuk pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; pendidikan dasar; kesetaraan gender; pengurangan angka kematian bayi dan balita; dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tujuan program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dari segala sisi. Akan tetapi, kegunaan dari uang yang diperbantukan tersebut belum tentu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mendapatkannya. Hal ini karena uang bantuan tersebut lebih banyak digunakan untuk konsumsi semata serta dalam segi kesehatan dan pendidikan sendiri, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkannya.

Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan di desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, (2) Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, (3) Bagaimana kesejahteraan masyarakat desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur sesudah adanya Program Keluarga Harapan dalam pandangan Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, (2) Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, (3) Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Marinnnggai, Lampung Timur setelah adanya Program Keluarga Harapan dalam pandangan ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi, kuisioner, dan dokumentasi, dengan responden yaitu peserta Program Keluarga Harapan desa Karya Makmur sebanyak 79 responden.

Berdasarkan lima indikator efektivitas Program Keluarga Harapan dapat disimpulkan bahwasanya seluruh indikator sudah berjalan dengan efektif kecuali indikator keluaran dan indikator manfaat yang belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Namun, Program Keluarga Harapan kurang efektif dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat kecilnya perubahan atau peningkatan kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya Program Keluarga Harapan serta tidak terpenuhinya seluruh indikator kesejahteraan atau setidaknya 9 dari 14 indikator terpenuhi namun pada penelitian ini tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan dapat memenuhi kebutuhan Ad-Dharuriyat, Al-Hijayati, dan Tahsiniyat dimana dari semua kebutuhan selain terpenuhi, juga ada peningkatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Pada Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur)

Nama Mahasiswa : Sofyan Eka Sandi

NPM : 1351010127

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 26 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Any Eliza. S.E., M.Ak
NIP.198308152006042004

Fatih Fuadi. S.E., M.S.I
NIP.198512192015031006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Pada Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur), disusun oleh: Sofyan Eka Sandi, NPM: 1351010127, program studi: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: 6 Agustus 2018

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : A. Zuliansyah, S.Si., MM.

(.....)

Sekretaris Sidang : Dinda Fali Rifan, M.Ak

(.....)

Penguji I : Femei Purnamasari, SE., M.Si

(.....)

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
NIP.19580814 198903 1 003**

MOTTO

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isra' : 26)*

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Syukur dan ibu Rusdiya Aini dengan pengorbanan dan doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta, kakak Supran Eliyadi, kakak Toni Hermawan, kakak perempuan Tri Aprilia.S.E, kakak perempuan Arlin Novita Rani dan adik Zul Karnain Subing, adik Rizka Suganda, adik Rizki Sugandi yang selalu member dukungan kepada penulis.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi serta sabar dalam menanti keberhasilanku.
4. Almamater UIN Raden Intan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bandar Lampung yang kucintai.

RIWAYAT HIDUP

Sofyan Eka Sandi, Lahir di Desa Bandar Sari, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur, pada tanggal 26 November 1993, anak ketiga dari enam bersaudar, pasangan Bapak Syukur dan Ibu Rusdiya Aini.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Karya Makmur, kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, tahun 2000 dan selesai 2006;
2. MTs Madinah, di desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2010;
3. SMA Perintis 2 Bandar Lampung, jl. Khairil Anwar No.106 Durian Payung, Bandar Lampung. program: Ilmu Pengtahuan Sosial, dan selesai pada tahun 2013;
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah pada Tahun 2013 dan selesai pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang tak terhingga kepada Yang Maha Agung, Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)”**

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam Ilmu Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, taklupa penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Ani Eliza, S.E., M.Ak. Selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Fatih Fuadi, S.E., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

perhatian, bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ibu dosen, para staff dan karyawan UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan, baik perpustakaan Pusat maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu memberikan informasi tentang referensi dan lain-lain selama penulis kuliah dan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak lurah desa Karya Makmur sebagai tempat penelitian yang telah membantu memberikan data dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat yang telah membantu saya selama mengerjakan skripsi, Aula Nurul Ma'rifah S.E.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Tubagus Agil S.E, Rizky Kurniawan Redho S.E, Dwi Crismanto S.E, Sandi Kurniawan S.E, M. Agus Hermawan S.E, Najib Setiawan, Jumrotul Arafat S.E, Syamsul Arifin S. E, Surono S.E, Ahmad Sodikin, Khuzain Rahman S.E, Anggun Tri Wahyuni S.E, Umi Rohmah S.E, Umi Mursidah S.E, Ike Juni Antika S.E, Rizky Kusumaningtyas, Yuli Widyastuti S.E, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Rekan-rekan yang telah memberikan semangat kepada saya terutama Afan Ghafar Ario Bimo, Ahmad Busroni, Okbar Junaidi, Julian Sholeh S.H,

Solihin Abdillah, Muhammad Muzakki M.Pd, Arifin, Rifqi Priambudi,
Agung Ikhsan, dan Beni.

10. Rekan-rekan organisasi FMN terutama Nova S. Putri, Wanda Maharani
Siraid S.E, Sherly Guswita Sari S.Pd, Megayati Lestari S.Pd, Vivi, Okta,
Alittia S.E, Selvi, dan rekan-rekan lain yang tidak bias disebutkan satu per
satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat sangat jauh dari kata
sempurna, akan tetapi berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta
keilmuwan yang terkait dengan Ekonomi Islam.

Bandar Lampung,

Penulis

SOFYAN EKA SANDI
NPM. 1351010127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	6
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Program Keluarga Harapan	18
1. Pengertian Program Keluarga Harapan	18
2. Tujuan Program Keluarga Harapan	19
3. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan	19
4. Besaran Bantuan	23
5. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	26
6. Ukuran Efektivitas	27
B. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam	28
1. Pengertian Kesejahteraan	30
2. Dasar Hukum Kesejahteraan	33
3. Cara Mencapai Kesejahteraan	37
4. Indikator Kesejahteraan	39
5. Dampak Positif dari Kesejahteraan	41
C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Konvensional	
1. Pengertian Kesejahteraan	43
2. Dasar Hukum Kesejahteraan	44
3. Cara Mencapai Kesejahteraan	46
4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	47
5. Dampak Positif dari Kesejahteraan	52

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN.....	53
A. Gambaran Umum Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat Desa Karya Makmur	53
2. Kondisi Demografis Desa Karya Makmur	54
3. Program Keluarga Harapan di Desa Karya Makmur	61
4. Karakteristik Responden	63
5. Hasil Kuisisioner Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Makmur, Labuhan Maringgai, Lampung Timur	65
BAB IV ANALISIS DATA.....	83
A. Afektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur	83
B. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur	88
C. Program Keluarha Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Makmur Perspektif Ekonomi Islam	99
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaiakain judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “**Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)**”

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet IV), (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011), h.58.

2. Efektivitas.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil seiring atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan input dan outputnya.²

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.³ Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan sendiri adalah program perlindungan social melalui pemberian uang non tunai kepada rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibuhamil/ nifas /menysui dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dimana mereka mendapatkannya dalam bentuk kartu seperti ATM namun tidak dapat untuk menyimpan uang melainkan hanya untuk mengambil uang bantuan.⁴

²*Ibid.* h.147.

³*Ibid.* h.325.

⁴ Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Kemensos, 2012).

4. Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat sering di definisikan dengan kesejahteraan social. Kesejahteraan social dapat di definisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi social melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial.

5. Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan *Sunnah*.⁵

Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Oleh karena itu apa yang dianggap sebagai pemikiran ekonomi, perlu kita amati dengan suatu sikap bertanya: kemana dan untuk apa?⁶

Dari penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui taraf tercapainya hasil dari keberadaan program pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan

⁵ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), h.19.

⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h.2.

kesejahteraan masyarakat yang dipandang menurut ekonomi Islam yang terjadi di Desa Karya Makmur, kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur dengan menggunakan pendekatan langsung.

Pendekatan ini dilakukan guna mendapatkan data akurat yang didapatkan langsung pada objek penelitian. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang tidak tepat sasaran dengan tujuan penelitian.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ‘Analisis Efektivitas Program Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)’ yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif.

Mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial mendasar yang dihadapi oleh setiap bangsa Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan atau program pengentasan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bentuk perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi, kegunaan dari uang yang diperbantukan tersebut belum tentu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mendapatkannya. Hal ini karena uang bantuan tersebut lebih banyak digunakan untuk konsumsi semata dibandingkan untuk kegiatan produksi atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan perputaran uang serta dalam segi kesehatan dan pendidikan sendiri masih banyak masyarakat yang belum mendapatkannya.

Selain itu, dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat memungkinkan diadakan penelitian mengingat lokasi penelitian terjangkau oleh penulis.

2. Alasan Subjektif.

Berdasarkan aspek yang penulis bahas, skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yang penulis tempuh yaitu ekonomi islam pada fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri raden intan lampung yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang membahas kesejahteraan masyarakat. Selain itu penulis optimis penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan mengingat tersedianya sumber dari literature yang dibutuhkan baik tersedia dipergustakaan maupun sumber lain nya seperti jurnal, artikel, dan data yang diperlukan

C. Latar belakang masalah

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka pengatasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sejalan dengan pernyataan ini definisi pembangunan sosial adalah sebagai pembangunan yang dilakukan dari dan oleh rakyat.⁷

Sumarno Nugraho dalam Soetomo menggunakan pengertian pembangunan sosial yang diambil dari rumusan *Pre Confrence Working Party* dari *International Conference of Sosial Welfare* yang mengartikan pembangunan sosial sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi social dan nilai-nilai yang berhubungan

⁷Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 312

dengan hal itu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pembangunan social memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi social mereka.⁸

Konsep pembangunan social juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita Negara kesejahteraan (*Welfare State*). Sejak awal kemerdekaan bangsa Indoensia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang meliputi 5 sasaran pokok yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam, serta peningkatan infrastruktur. Dalam implementasinya, prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, pentaan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Sasaran yang hendak dicapai melalui prioritas ini antara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya

⁸*Ibid.*

masyarakat miskin yang pada maret 2016 mencapai 28,01juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Ini artinya jumlah penduduk miskin diindonesia masih tinggi sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan kebijakan yang dibuat.

Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan masyarakat selama ini belum menyentuh esensi kehidupan masyarakat miskin itu sendiri sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Hal ini terkait dengan keberadaan masyarakat miskin yang juga merupakan penduduk Indonesia.

Salah satu program yang ditujukan oleh pemerintah untuk menyentuh langsung masyarakat miskin adalah program Program Keluarga Harapan yang merupakan program perlindungan social yang memberikan bantuan secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bertujuan untuk pembangunan millennium dimana didalamnya termasuk pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; pendidikan dasar; kesetaraan gender; pengurangan angka kematian bayi dan balita; dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tujuh program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dari segala sisi.⁹

⁹ Tim Nasional Percepatan Pembangunan, *Program Keluarga Harapan* (Jakarta: TNP2K, 2012).

Program keluarga harapan ini memiliki dasar hukum yaitu :¹⁰

- Peraturan presiden tentang bantuan social non tunai
- PMK No.228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK No.254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan social pada kementerian Negara/ lembaga
- Permensos tentang pelaksanaan PKH(finalisasi)
- SK dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang pedoman umum PKH
- Perjanjian kerjasama bank himbara (BNI, BRI,BTN dan mandiri).

Pemberian uang memang pada tujuannya sendiri dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi jika pemberian bantuan berupa uang tersebut hanya digunakan untuk konsumsi semata makamasyarakat miskin akan terus mengharapkan bantuan tersebut sehingga statusnya tetap sebagai masyarakat miskin. Lain halnya jika bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produksi (walaupun kecil jenis produksinya) sehingga adanya perputaran uang yang diharapkan dapat merubah status masyarakat miskin tersebut menjadi masyarakat berada yang mana nanti nya tidak perlu lagi mendapatkan bantuan.

Hal tersebut tentu akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan di Indonesia termasuk keberadaan Program Keluarga Harapan yang program ini sudah dilaksanakan di Indonesia.¹¹ program ini pun telah dilaksanakan di

¹⁰ DR. IR. R. Herry Hikmat, M.Si, *Kebijakan pelaksanaan program keluarga harapan* (Padang,2017)

¹¹ Sumber, *UPPKH- Kemensos,2014*

desa Karya Makmur kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dimana diharapkan juga ada peningkatan kesejahteraan disini. Sebagian besar masyarakat di desa Karya Makmur belum mencapai tingkat kesejahteraan karena mata pencaharian utama masyarakat yang berupa buruh kasar, petani yang terkadang belum cukup memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam hal ini perlu adanya perhatian pemerintah yang mana selama kurang lebih 2 tahun belakangan, masyarakat miskin mendapatkan bantuan berupa Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin, anak sekolah yang kurang mampu, ibu hamil yang dibawah garis kemiskinan, maupun lansia. Akan tetapi seberapa efektifkah program ini dan seberapa pengaruhnya terhadap pengurangan angka kemiskinan di Desa Karya Makmur perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini karena kurang terlihat adanya perubahan semenjak beredarnya Program Keluarga Harapan ini. Ada 79 orang yang menerima program keluarga harapan ini di desa karya makmur.¹² Jika melihat indikator program keluarga harapan, ternyata masih ada masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan ini, akan tetapi masih mendapatkannya.

Jika dilihat dalam perspektif Islam, keberadaan Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan tentu merupakan hal yang positif seperti yang tertuang pada Q.S An-Nisa 58 :

﴿إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا ۖ إِنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَىٰ الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ ۗ إِنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ ۖ إِنَّ

﴿بَصِيرًا سَمِيعًا ۖ كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا ۗ﴾

¹²Sapta, "Unit Pengelola Program Keluarga Harapan," Labuhan Maringgai, Lampung Timur 2017

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat ini sejalan dengan latar belakang masalah dimana pemerintah memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan yang dapat digunakan untuk menarik uang kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga adanya kesejahteraan dan keadilan di sisi masyarakat dan tidak ter-dzolimi oleh pemerintah.

Selain itu, Islam juga menegaskan kalau ada baiknya tangan tidak selalu dibawah. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada perubahan dari masyarakat miskin untuk memperbaiki diri sehingga tidak menerima bantuan lagi sebagai keluarga tidak mampu dengan menggunakan uang tersebut sebaik mungkin terutama tidak hanya untuk konsumsi semata untuk bantuan berupa uang tunai bagi keluarga miskin yang biasanya hanya menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari atau barang habis pakai.

D. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan di desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Efektivitas Program Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

3. Bagaimana kesejahteraan masyarakat pada Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sesudah adanya Program Keluarga Harapan dalam pandangan Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui efektifitas Program Keluarga Harapan di desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui efektivitas program Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- c. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur setelah adanya Program Keluarga Harapan dalam pandangan Ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai dan sumbangan pemikiran efektivitas program Program Keluarga Harapan dalam khasanah Ekonomi Islam khususnya dan menambah literature mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya jurusan Ekonomi Syariah.
- b. Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya yang mendapatkan Program Keluarga Harapan sehingga bantuan

tersebut berguna bagi kesejahteraan dan sebagai masukan bagi pemerintah untuk pengembangan program ini agar lebih baik lagi.

F. Metode Penelitian.

Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.¹³ Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancan yang sebenarnya.¹⁴

Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu: penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian

¹³ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT.Gramedia,2010), h.13

¹⁴ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju,Bandung,1996,hlm 32

ini, pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana efektivitas program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat desa karya makmur.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data secara wawancara maupun observasi langsung dengan masyarakat yang menerima kartu keluarga harapan, dengan kata lain data primer diperoleh dari masyarakat desa karyamakmur yang menerima program keluarga harapan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-Qur'an, hadist, buku-buku, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Dalam metode observasi peneliti menggunakan jenis observasi non partisipasi, observasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari objek penelitian yaitu anggota-anggota PKH dan pengelola PKH mengenai Efektifitas Program Keluarga Harapan.

b. Metode kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan metode kuesioner adalah cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.¹⁶ Kuesioner ditujukan kepada responden yaitu 79 anggota PKH di Desa Karya Makmur.

c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan yang lainnya.¹⁷ Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, yang penulis peroleh dari masyarakat yang menerima program keluarga harapan. Dokumen

¹⁵ Igusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, Edisi1), h.52

¹⁶ Sugiyono, h. 220

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 152

yang digunakan berupa foto maupun catatan-catatan dalam program keluarga.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.¹⁸ Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.¹⁹ Pada penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang menerima program keluarga harapanyaitu berjumlah 79 orang.²⁰

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan *Purposive Sampling* yaituteknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Perhitungan banyaknya sample didasarkan pada perhitungan persentase dari jumlah populasi terjangkau apabila subyek populasi lebih dari 100, maka sampel yang diambil hanya 10% sampai 15%

¹⁸ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta:Renika Cipta, 1991), h.206

¹⁹ Ibid h.130

²⁰ Sata, *Pengelola Program Keluarga Harapan Desa Karya Makmur, Labuhan Maringgai*.

saja dari masyarakat setempat.²¹ Namun dalam hal ini penelitian terkait program keluarga harapan sampel yang diambil berjumlah 79 orang.²²

6. Metode Analisis Data

Data hasil kuesioner dan data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dimulai dengan pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Maksudnya yaitu menganalisis data-data yang diperoleh dari responden maupun data-data yang bersifat sekunder yang didapat dari media elektronik maupun media cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

²¹ Ibid h. 133

²² Sapta, Pengelola Program Keluarga Harapan Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan *Millenium*. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan

jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.²³

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:²⁴

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM.
- d. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.

3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan

²³TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) hlm. 1

²⁴*Ibid.* hlm. 5

anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:²⁵

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

Anak Usia 0-6 Tahun:

- 1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- 2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/ *Early Childhood Education*) apabila lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

²⁵*Ibid.* hlm. 8-10

Ibu Hamil dan Ibu Nifas:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka)

- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Lansia 70 Tahun Keatas

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- 2) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*)

d. Penyandang Disabilitas Berat

- 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*)

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

4. Besaran Bantuan

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Ketentuan Indeks dan Komponen Bantuan

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp/Tahun/Keluarga)
1	KPM regular	Rp.1.890.000,-
2	KPM Lanjut Usia	Rp.2.000.000,-
3	KPM Penyandang Disabilitas	Rp.2.000.000,-
4	KPM diPapua dan Papua Barat	Rp.2.000.000,-

Tabel diatas menunjukkan komponen bantuan menurut jenisnya baik reguler (keluarga miskin atau bantuan sekolah), lanjut usia, penyandang disabilitas, dan penerima untuk Papua serta Papua Barat (khusus). Komponen bantuan tersebut menunjukkan juga jumlah bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan pemerintah.

Dalam menerima bantuan tersebut, ada dua ketentuan yaitu secara tunai maupun tidak tunai yaitu:

a. Tunai

- Transfer dana dari kas Negara ke lembaga bayar disalurkan tiap tahap
- Bantuan dcaikan kerekening KPM sebanyak 4 tahap.
 - Tahap 1 = Rp. 500.000,-
 - Tahap 2 = Rp. 500.000,-
 - Tahap 3 = Rp. 500.000,-
 - Tahap 4 = Rp. 390.000,-

b. Non Tunai

- Taransfer dana dari kas Negara ke lembaga bayar dapat disalurkan sekaligus
- Pencairan bantuan hanya dapat dilakukan oleh KPM sebanyak 4 tahap
 - Tahap 1 = Rp. 500.000,-
 - Tahap 2 = Rp.500.000,-
 - Tahap 3 = Rp.500.000,-
 - Tahap 4 = Rp.390.000,-

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–Juni– September–November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.

Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus Peserta PKH pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:²⁶

- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
- b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-

²⁶*Ibid.* hlm. 9-10

- c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
- d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut,
- e. Maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan di atas berlaku secara *tanggung renteng* untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH.

5. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 (enam) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain keenam tahap tersebut dapat dilihat pada skema proses utama pelaksanaan PKH sebagai berikut.

PKH yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:²⁷

- 1) Penyediaan data calon Peserta PKH (mulai tahun 2012 bersumber dari Basis Data Terpadu/berdasarkan data dari BPS).
- 2) Penetapan lokasi dan penentuan calon Peserta PKH (Penetapan Sasaran).
- 3) Pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan data calon Peserta PKH (Validasi).

²⁷*Ibid*, hlm. 19-20

- 4) Pembayaran dana tunai yang terdiri dari: Pembayaran pertama setelah validasi bagi peserta baru dilakukan dan pembayaran selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainnya.
- 5) Verifikasi kepatuhan kewajiban.
- 6) Pemutakhiran data.

6. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauhmana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM. Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

- a. Indikator *masukan*, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.
- b. Indikator *proses*, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.

- c. Indikator *keluaran*, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.
- d. Indikator *manfaat*, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.
- e. Indikator *dampak*, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.

B. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya islam di muka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif islam menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran dan pedoman islam sendiri.²⁸

Ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Cara-cara yang islami tersebut dimaksudkan adalah cara yang didasarkan atas ajaran islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi.²⁹ Ekonomi islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada

²⁸Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2013), h.8

²⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P33EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 17

persoalan tersebut menurut perspektif ekonomi islam.³⁰ Dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasari pada ajaran islam.

Nilai-nilai yang menjadi dasar dalam ekonomi islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam berekonomi dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yakni:

a) Keadilan

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.³¹ Keadilan juga berarti menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran.³²

b) Pertanggung Jawaban

Untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seseorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan

³⁰Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.14

³¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P33EI), *Op.cit.*, h.59

³²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Terjemah Soeroyo, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000), h.52

kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.³³

c) Takaful

Takaful adalah jaminan sosial yang merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal tetapi juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.³⁴

1. Pengertian Kesejahteraan

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.³⁵

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan/ kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta

³³Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.63

³⁴*Ibid.*,

³⁵Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah, STAIN Kudus, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015), h.388

kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam.³⁶

Pendefinisian islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran islam adalah sebagai berikut:³⁷

a. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa. Karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat

Manusia tidak hanya hidup didalam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/ kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat.

Menurut falsafah Al-Quran, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah*, yaitu istilah yang dimaksud untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Jika *falah* ini dapat tercapai, manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, suatu

³⁶*Ibid.*,

³⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P33EI), *Op.cit.*, h.4

keadaan dimana kedua aspek tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan.³⁸

Menurut Al-Ghazali, Kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yang terdiri dari 5 hal, yakni agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.³⁹

Dalam hidup manusia harus membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran maka dari itu manusia membutuhkan agama (*dien*). Keimanan, terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara pandang terhadap dunia yang dapat memengaruhi kepribadian, sikap dan mental. Seperti misalnya perilaku, gaya hidup, selera, sikap manusia, dan lingkungan sekitar.⁴⁰ Jiwa (*nafs*), akal (*aql*) dan keturunan (*nasl*), ditempatkan pada urutan selanjutnya karena ia berhubungan dengan

³⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Terjemahan Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.3

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h.88

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Op.cit.*, h.67

manusia itu sendiri, yang mencakup kebutuhan fisik, moral dan psikologi (mental).⁴¹

Harta material (*maal*) dibutuhkan baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Selain itu hampir semua ibadah membutuhkan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.⁴²

Dalam islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dari aspek material saja melainkan dari ukuran non material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial.⁴³

2. Dasar Hukum Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dicapai bila manusia yang telah Allah SWT jadikan khalifah di bumi ini berusaha dengan maksimal seperti dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ آلِ آرَاضٍ وَأَسْتَعْمُرِكُمْ فِيهَا فَآسَوْا فِيهَا فَاذْكُرُوا لَهُمْ
تُؤْبُوْا إِلَىٰ إِلَهِهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾ (Q.S Hud : 61)

⁴¹*Ibid.*,

⁴²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P33EI), *Op.cit.*, h.6-7

⁴³Afzalur Rahman, *Op.cit.*, h.54

Artinya :“ Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”⁴⁴

Manusia diberi segala kemampuan oleh Allah SWT tidak lain diperuntukkan untuk mensejahterahkan kehidupan di bumi yang akan berdampak pada kehidupan di akhiratnya. Untuk mencapai *falah* yakni kesejahteraan di dunia dan di akhirat, maka kekayaan materi merupakan bagian dari *falah*. Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia. Islam tidak mencela kebutuhan akan materi dalam aktivitas kehidupan manusia.⁴⁵

Harta yang telah Allah SWT berikan kepada manusia bukan saja untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, melainkan didalam harta tersebut terdapat bagian untuk orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim, fakir miskin dan lain-lain. Oleh karenanya islam sangat mengatur bagaimana mengatur keuangan dan penggunaan harta tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT :

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h.228

⁴⁵Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Op.cit.*, h.11

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَ فِئْتَهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

(Q.S An-Nisa : 6) بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut."⁴⁶

Dalam ayat tersebut diatas Allah SWT mewajibkan kepada para pengasuh anak-anak yatim maupun orang-orang yang mampu, mereka harus berhati-hati dengan harta anak-anak yatim dan jangan bersikap boros dalam menggunakan harta. Apabila pengasuh memiliki harta dan modal, maka ia tidak memiliki hak untuk mengambil harta anak yatim. Dan apabila ia seorang fakir maka ia dapat mengambil upah sekadarnya dan untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya. Ayat tersebut menjelaskan untuk tidak berperilaku boros dalam menggunakan harta, maupun menggunakan harta anak-anak yatim yang diasuhnya.

Memiliki harta atau materi untuk memenuhi kebutuhan hiduppun tidaklah cukup untuk mengukur kesejahteraan seseorang, keturunan atau anak merupakan bagian dalam mencapai *falah*, dan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT yakni:

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h.77

وَلَا يَخِشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
(Q.S An- ٩) عَلَيْهِمْ فَلَا يَتَّقُوا اللَّهَ وَلَئِنْ قَالُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Nisa: 9)

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makanan yang bergizi, merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Hendaklah orang tua takut apabila meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Maka orang tua hendaknya perlu mempersiapkan segala kebutuhan yang akan datang. Ayat ini juga menjelaskan harta waris, sebagai peringatan kepada orang-orang yang berkenaan dengan pembagian harta waris, agar jangan menelantarkan anak-anak yatim yang dapat berakibat pada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ayat tersebut memberi pesan kepada orang yang memelihara anak yatim orang lain agar memiliki kekhawatiran dikemudian hari mereka terlantar dan tak berdaya sebagaimana ia khawatir kalau hal itu terjadi pada anak-anak kandungnya sendiri.⁴⁸

⁴⁷Ibid.,

⁴⁸Dadang Kurniawan, *Pendidikan Orang Tua Pada Anak: Telaah Pada Al-quran Surat An-Nisa : 9 dan At-Tahrim: 6*, (Skripsi Program Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, 2015), h.72

Maka jelas dalam islam manusia sebagai makhluk sosial harus saling membantu dengan cara distribusi kekayaan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat merata di masyarakat sebagai prinsip utama. Di samping itu islam memperkenalkan waris sebagai batasan bagi pemilik harta dan kewajiban zakat serta infak sebagai langkah-langkah yang dapat diambil agar mencegah pemusatan kekayaan pada golongan tertentu. Manusia berkewajiban untuk saling membantu agar terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh.⁴⁹

3. Cara Mencapai Kesejahteraan

Sistem kesejahteraan masyarakat dalam Islam bukan sekedar bantuan keuangan atau apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan-bantuan yang dianjurkan islam. Kunci dari untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang panjang, yaitu:⁵⁰

- a. Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.
- b. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jika akan merasakan ketenangan apabila kepribadian terpecah.
- c. Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, setelah usaha maksimal adalah pilihan terbaik dan selalu mengandung hikmah, karena

⁴⁹Ruslan Abdul Ghofur, *Op.cit.*, h.18

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 129-133

itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepada-Nya.

- d. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istri baik dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan pendidikan.
- e. Menyisihkan sebagian hasil usaha untuk menghadapi masa depan. Sebagian lain (yang mereka tidak nafkahkan itu) mereka tabung guna menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga.
- f. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan antara keduanya, sekali lagi kewajiban dan hak tersebut tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun penyerahan harta benda, tetapi mencakup aspek kehidupan.
- g. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya yang beroperasi. Karena itulah monopoli dilarang oleh Allah SWT.
- h. Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta, dan kehormatannya, jangankan membunuh atau mengejek dengan sindiran halus, atau menggelari dengan sebutan yang tidak senonoh, berperasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan dan sebagainya.

Kesemua ini dilarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan tidak aman, rasa takut, maupun kecemasan yang mengantar kepada tidak tercapainya kesejahteraan lahir batin yang didambakan.

4. Indikator Kesejahteraan

Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).⁵¹

a. Prioritas Utama

Ad-Dharuriyat ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. *Dharuriyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yakni mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyat* diabaikan, maka tidak ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian nyata di akhirat.

⁵¹Adiwarman A. Karim, *Loc.cit.*,

b. Prioritas Kedua

Al-Hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan syariah. Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara' dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

c. Prioritas Ketiga

Tahsiniyat atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syariat menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup bahkan kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital

bagi lima pondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok kebutuhan ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi atau menghiasi hidup.⁵²

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/ primer, sekunder, maupun tersier dan pelengkap. Disebabkan oleh itu pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁵³

5. Dampak Positif dari Kesejahteraan

Imam Al-Ghazali meletakkan harta benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan utama. Ia hanya suatu perantara (alat) meskipun sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Hal ini menuntut kriteria moral tertentu dalam menikmati harta benda. Apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri, akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidak seimbangan dan perusakan

⁵²*Ibid.*,

⁵³Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.cit.*, h.89

lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat dimasa sekarang maupun generasi yang akan datang.⁵⁴

Tiga tujuan yang berada di tengah (kehidupan, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama *syariat*. Kehidupan, akal dan keturunan umat manusia seluruhnya itu yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan hanya mereka yang sudah kaya dan kelas tinggi saja. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan ini bagi umat manusia harus dianggap sebagai kebutuhan. Begitu juga semua hal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya seperti makanan yang cukup, sandang, papan, pendidikan spritual dan intelektual, lingkungan yang secara spritual dan fisik sehat (dengan ketegangan, kejahatan dan polusi yang minim), fasilitas kesehatan, transportasi yang nyaman, istirahat yang cukup untuk bersilahturahmi dengan keluarga dan tugas-tugas sosial dan kesempatan untuk hidup yang bermartabat.⁵⁵

Semua pemenuhan kebutuhan dalam konsep tercapainya kemaslahatan atau kesejahteraan akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang. Kedamaian, kenyamanan, sehat, dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan *falah* dan *hayatan thayyibah*, maka dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Kesadaran untuk syukur nikmat, lebh dekat kepada Allah SWT dengan peningkatan kualitas ibadah

⁵⁴M.Umar Chapra, *Op.cit.*, h.8

⁵⁵*Ibid.*, h.9

- b. Tercukupinya semua kebutuhan hidup
- c. Menimbulkan kesadaran untuk berbagi sebagian rizki dari Allah SWT dalam bentuk *zakat, infaq dan sodaqoh, wakaf* dan lain-lain
- d. Terwujudnya ketenangan jiwa
- e. Mampu mencapai kesehatan lahir dan batin.

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Konvensional

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Adapun sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari gangguan kesukaran dan sebagainya). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidakhanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual).⁵⁶

⁵⁶ Herien Puspita, *Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga*, (Bogor: PT.IPB Press, 2012),

Menurut Walter A. Friendlander Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.⁵⁷

Sedangkan menurut Todaro dan Stephen C. Smith Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi;

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pakaian, dan kesehatan.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa, yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.⁵⁸

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan pengertian kesejahteraan masyarakat diatas, bahwa kesejahteraan adalah keadaan

⁵⁷Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta:Amzah, 2016), h.40

⁵⁸Yudi Firmansyah, *Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan dikaji dari Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Of Islamic Education Management*, Juni 2016 Vol. 2 No. 1, pp 141-160 (29 Januari 2017), h.153

masyarakat yang aman, damai, sentosa dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan baik sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain serta memperoleh kesempatan seluas-luasnya agar mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Dasar Hukum Kesejahteraan

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan yang disebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. UU No.11 Tahun 2009 Bagian II Pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:⁵⁹

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c. Melaksanakan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial

⁵⁹ UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, BAB II Pasal 25, Diunduh melalui: <http://dapp.bappenas.go.id>, pada Tanggal 27 Januari 2017, pukul 14.30 WIB

- g. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanann kesejahteraan social
- h. Melaksanakan analis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktifitas pembangunan.
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan social
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Cara Mencapai Kesejahteraan

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi:⁶⁰

- a. Uang atau Barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
- b. Jasa Pelayanan (Service), berupa bimbingan dan penyuluhan
- c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan semacamnya.

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

⁶⁰Usman Yatim, *Zakat Dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992), h. 243

Selain itu Upaya-upaya pemecahan masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁶¹

a. Latihan Pendidikan Keterampilan

Dengan adanya latihan keterampilan ini diharapkan seseorang anggota masyarakat mempunyai bekal kemampuan untuk terjun dalam dunia kerja. Upaya peningkatan keterampilan ini telah dilaksanakan oleh pemerintahan yaitu dengan dibentuknya balai latihan keterampilan yang ada diberbagai kota.

b. Berwiraswasta

Modal kemampuan yang berupaketerampilan akan menunjang atau memberi bekal bagi seseorang untuk memperoleh pendapatan yang dapat diterapkan melalui dunia wiraswasta. Karena bagaimanapun juga tidak semua orang menjadi pegawai negeri, meskipun telah menyelesaikan studinya di suatu pendidikan formal. Jiwa wiraswasta perlu ditanamkan sejak anak-anak, sehingga kemampuan berusaha ada pada setiap anak atau orang dewasa.

c. Pemasyarakatan Progam Keluarga Berencana

Pemasyarakatan progam Keluarga Berencana ini sangat diperlukan terutama dalam kaitannya dengan pengendalian jumlah penduduk yang terlampau cepat. Pertumbuhan di bidang ekonomi dapat mempunyai arti jika dibarengi dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

⁶¹Hartomo Dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h.331

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.

Adapun indikator menurut instansi pemerintah yang menangani kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

a. BAPPENAS

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.⁶²

b. BKKBN

1) Tahap *pra sejahtera*

⁶²Hendrik, *Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Bawah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Riau*, Jurnal Perikanan dan Kelautan, 20 Mei 2011, diakses pada 11 Maret 2017, h. 23

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana.

2) Tahap sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing
- b) Paling kurang satu kali dalam seminggu makan daging/ikan/telur
- c) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun
- d) Luas lantai rumah $8M^2$ untuk setiap penghuni rumah
- e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat
- f) Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
- g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
- h) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

3) Tahap Sejahtera II

Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator berikut:

- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang
- c) Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi
- d) Mengikuti kegiatan masyarakat
- e) Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah

4) Tahap sejahtera III

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a) Memberikan sumbangan materil secara teratur
- b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

5) Tahap *sejahtera III plus*

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari keluarga para sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.⁶³

c. BPS

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), ada 14 kriteria untuk menentukan penggolongan rumah tangga miskin atau sejahtera melalui sebagai berikut:⁶⁴

⁶³Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (Online) tersedia di: www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/, diakses pada (Jum'at, 12 Mei 2017 Pukul22:30 WIB)

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam/ telur/ikan dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dari indikator yang telah disebutkan di atas masyarakat yang tergolong miskin jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga tersebut tergolong rumah tangga miskin.

5. Dampak Positif dari Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai jumlah kemakmuran semua anggota dari masyarakat tertentu. Menggunakan penilaian atas nilai dalam pengertian bahwa individu menilai kemakmuran mereka sendiri untuk diperhitungkan dalam formulasi suatu ukuran kesejahteraan sosial, dengan demikian kesejahteraan sosial meningkat apabila setidaknya ada individu yang meningkatkan kesejahteraannya, dan tidak ada individu yang mengalami penurunan kesejahteraannya. Kesejahteraan sosial dapat terjadi jika individu mengkompensasikan sebagian keuntungan atau harta yang dimiliki untuk individu lain yang memerlukan.⁶⁵

Meskipun kebahagiaan hidup pada sebuah rumah tangga tidak semata-mata tergantung dari barang materiil, namun perkara uang atau ekonomi rumah tangga merupakan hal yang penting sekali. Untuk

⁶⁵Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.379

kebanyakan orang dalam masyarakat bahkan merupakan masalah pokok, bagaimana menyambung hidup dan mencari sesuap nasi untuk anak dan istri dengan penghasilan yang terbatas.⁶⁶ Pada dasarnya masyarakat yang adil dan makmur dimulai dari dalam keluarga yang makmur, sejahtera dan bahagia. Jadi tercapainya kesejahteraan individu maupun rumah tangga akan berdampak pada masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera dan pada akhirnya memberi dampak kesejahteraan sebuah negara.⁶⁷



⁶⁶T. Gilarso, *Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986),h. 45

⁶⁷*Ibid.*, h.46

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Karya Makmur

Desa Karya Makmur berasal dari hutan produksi register 15, dibuka pada tahun 1976 oleh warga petani yang didukung oleh Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 1982 pembukaan desa telah ditanggapi oleh pemerintah dan diakui desa susukan (swakarsa) mandiri, dan pada tahun 1987 dibangun saluran dan jalan proyek rawa sragi 3, sejalan dengan pesatnya perkembangan desa, hingga pada tahun 1991 oleh pemerintah diangkat menjadi desa definitif (swakarya) setara dengan desa tetangga dapat mencalonkan dan memilih kepala desa. Desa Karya makmur terletak diujung selatan wilayah kecamatan labuhan maringgai 12 Km, jarak dari ibu kota kecamatan, transportasi lancar pada saat ini telah dibangun pelebaran jalan lintas Pantai Timur Bakauhuni-Medan. Dengan jumlah penduduk Desa Karya Makmur bulan Desember 2016.⁶⁸

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Penduduk laki-laki	1.465 Jiwa
2	Penduduk perempuan	1.297 Jiwa
	Jumlah	2.762 Jiwa

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

⁶⁸ Data profil desa karya makmur kec. Labuhan maringgai 2016

Desa Karya Makmur semula memiliki luas wilayah 810 Ha, yang terdiri dari tanah lahan pemukiman, tanah lahan petani, tanah lahan pertambakan, dan tanah fasilitas umum. Di karenakan adanya abrasi pantai, sehingga luas wilayah Desa Karya Makmur sampai saat ini menjadi 805 Ha.

Adapun batas – batas desa Karya Makmur sebagai berikut :⁶⁹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Bandar Negeri
- b. Sebelah timur berbatasan dengan pantai laut Timur
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pelindung Jaya dan Desa Nibung
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Karya tani

Penduduk 2.762 jiwa L/P dengan KK 748 KK, yang terdiri dari berbagai suku jawa timur, jawa tengah, jawa barat, bali, lampung, batak dan bugis. Mata pencaharian tani sawah, tambak, nelayan dan dagang, serta atas kerja dari masyarakat dan begitu banyaknya bantuan yang telah dikucurkan oleh pemerintah sejak tahu 2008, sampai saat ini masih banyak memerlukan bantuan. Tingkat pendidikan pada desa karya makmur meliputi tingkat pendidikan umum dan agama: TPA, TPQ, Paud, TK dan SDN.

2. Kondisi Demografis Desa Karya Makmur

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dalam bidang usaha. Berikut ini

⁶⁹ Ibid

dapat dipaparkan keadaan demografi masyarakat Desa Karya Makmur, yaitu:⁷⁰

a. Usia Masyarakat di Desa Karya Makmur

Usia merupakan hal yang penting dalam melihat keadaan penduduk disuatu wilayah dalam rangka menilai sejauh mana produktifitas yang dimiliki masyarakat tersebut. Usia bila dihubungkan dengan kesejahteraan menjadi salah satu faktor seseorang dalam mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi seiring usia yang masih dikatakan muda atau produktif, jumlah penduduk berdasarkan usia yang ada di Desa Karya Makmur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah orang	Usia	Jumlah orang
1 Tahun	46 orang	31 Tahun	61 orang
2 Tahun	35 orang	32 Tahun	71 orang
3 Tahun	55 orang	33 Tahun	65 orang
4 Tahun	34 orang	34 Tahun	76 orang
5 Tahun	39 orang	35 Tahun	43 orang
6 Tahun	57 orang	36 Tahun	68 orang
7 Tahun	54 orang	37 Tahun	42 orang
8 Tahun	53 orang	38 Tahun	62 orang
9 Tahun	35 orang	39 Tahun	49 orang
10 Tahun	78 orang	40 Tahun	61 orang
11 Tahun	68 orang	41 Tahun	41 orang
12 Tahun	56 orang	42 Tahun	45 orang
13 Tahun	43 orang	43 Tahun	40 orang
14 Tahun	46 orang	44 Tahun	33 orang
15 Tahun	76 orang	45 Tahun	34 orang
16 Tahun	97 orang	46 Tahun	32 orang
17 Tahun	56 orang	47 Tahun	25 orang
18 Tahun	72 orang	48 Tahun	29 orang

⁷⁰ Ibid

19 Tahun	53 orang	49 Tahun	76 orang
20 Tahun	52 orang	50 Tahun	47 orang
21 Tahun	45 orang	51 Tahun	36 orang
22 Tahun	33 orang	52 Tahun	51 orang
23 Tahun	27 orang	53 Tahun	39 orang
24 Tahun	69 orang	54 Tahun	45 orang
25 Tahun	38 orang	55 Tahun	38 orang
26 Tahun	26 orang	56 Tahun	31 orang
27 Tahun	41 orang	57 Tahun	34 orang
28 Tahun	32 orang	58 Tahun	39 orang
29 Tahun	35 orang	+ 58 Tahun	40 orang
30 Tahun	79 orang		

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

Dari tabel diatas terlihat masyarakat di Desa Karya Makmur terdiri dari berbagai macam usia, masih banyaknya usia produktif di Desa Karya Makmur menjadi suatu dorongan pengembangan SDM agar lebih produktif sehingga arah peningkatan keadaan kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Makmur menjadi lebih tinggi.

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat standar penduduk di suatu daerah, dari pendidikan diharapkan akan mampu menambah produktifitas penduduk, karena pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam memperbaiki kehidupan individu yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan masyarakat di Desa Karya Makmur dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	105 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	307 orang
Usia 7-45 tidak pernah sekolah	305 orang
Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	203 orang
Tamat SD/ Sederajat	676 orang
SLTP/ Sederajat	410 orang
SLTA/ Sederajat	393 orang
D-1	- Orang
D-2	- Orang
D-3	- Orang
S-1	23 orang
S-2	2 orang
S-3	- orang

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat keadaan pendidikan masyarakat di Desa Karya Makmur dapat dikatakan belum cukup baik dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang ada di Desa Karya Makmur. Berikut ini dapat dilihat prasarana pendidikan yang ada di Desa Karya Makmur.

Tabel 5
Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Karya Makmur

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	1
3.	SD	1
4.	SMP	-
5.	SMA	-
6	TPA	2

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

Dari tabel diatas prasarana pendidikan yang dimiliki Desa Karya Makmur sudah cukup lengkap, dikarenakan semua sekolah baik dari pendidikan formal umum sampai pendidikan formal keagamaan tersedia di Desa Karya Makmur dan dari segi tingkatan sudah cukup mencakup dari play group sampai SMA sederajat.

c. Mata Pencaharian Penduduk Desa Karya Makmur

Mata pencaharian merupakan ladang penghasilan yang didapat seseorang, mata pencaharian merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Mata pencaharian penduduk di Desa Karya Makmur dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	300 orang
Buruh	134 orang
Pegawai Negeri	14 orang
Pengrajin	8 orang
Pedagang	112 orang
Peternak	3 orang
Nelayan	169 orang
Montir	10 orang
Dokter	-
Bidan/ perawat	3 orang
TNI/POLRI	2Orang

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat secara keseluruhan penduduk Desa Karya Makmur telah memiliki pekerjaan yang layak dan dapat dilihat secara keseluruhan memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan

yang tetap setiap bulannya Agama merupakan hal yang penting dalam menjamin keadaan hidup seseorang, karena agama merupakan suatu pedoman dalam hidup, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Berikut jumlah penduduk berdasarkan agama yang dipeluk masyarakat Desa Karya Makmur.

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	2.671 orang
Kristen	47 orang
Katolik	33 orang
Hindu	20 orang
Budha	-

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

Dari tabel tersebut mayoritas penduduk memeluk agama Islam, seseorang dikatakan sejahtera juga tidak dapat terlepas dari persoalan agama, karena ketenangan hidup bersumber juga dari pedoman atau agama yang dimiliki seseorang. Fasilitas peribadatan juga tak kalah penting dalam mendukung terciptanya kedamaian dalam beragama, fasilitas peribadatan masyarakat Desa Karya Makmur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Jumlah Sarana Peribadatan

No.	Jenis Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3 buah
2.	Langgar/ Surau/ Mushola	5 buah
3.	Gereja Kristen protestan	2 buah
4.	Gereja khatolik	-
5.	Wihara	-
6.	Pura	1 buah

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

Dari tabel di atas dapat terlihat semua prasarana peribadatan yang ada adalah penunjang peribadatan masyarakat yang memeluk agama Islam.

d. Kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena dengan keadaan hidup yang sehat akan mampu meningkatkan produktifitas seseorang. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menggambarkan tingkat kualitas hidupnya. Prasarana kesehatan juga sangat penting dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sarana kesehatan yang dimiliki

Desa Karya Makmur adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Akses Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Rumah sakit umum	-
2.	Puskesmas	-
3.	Puskesmas pembantu	-
4.	Poliklinik/ balai pengobatan	-
5.	Puskesdas	1 unit
6.	Posyandu	4 unit
7.	Toko obat	-
8.	Apotik	-
9.	Tempat dokter praktek	-

Sumber: Data dokumentasi desa Karya Makmur 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat fasilitas kesehatan yang ada di Desa Karya Makmur sudah cukup mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, walaupun tidak adanya rumah sakit

ataupun puskesmas, mengingat Desa Karya Makmur memiliki letak yang strategis yakni berada di pusat Kota, maka jarak untuk mencapai ke rumah sakit dan ke puskesmas cukup terjangkau.

3. Program Keluarga Harapan di Desa Karya Makmur

a. Sejarah PKH di Desa Karya Makmur

Berdasarkan hasil Tanya jawab, program keluarga harapan (PKH) sudah berlangsung sejak tahun 2015, penyaluran PKH bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, program ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.⁷¹

Berikut ini adalah nama- nama penerima (PKH) di Desa Karya Makmur, yaitu :

Tabel 10
Jumlah Penerima PKH di Desa Karya Makmur

No	Nama	Komponen Bantuan	No	Nama	Komponen Bantuan
1	Martini	Lansia	41	Aminah	Reguler
2	Nurul Muwanah	Reguler	42	Sukini	Reguler
3	Ponitri	Reguler	43	Sumiati/ titik	Reguler
4	Marsi	Reguler	44	Sutarmi	Reguler
5	Erna Wati	Reguler	45	Sulastri	Lansia
6	Sri Mi	Lansia	46	Suparmi	Reguler
7	Poniyem	Reguler	47	Sumiatun	Reguler
8	Siti Yasatun	Reguler	48	Gianti	Lansia
9	Dwi Lestari	Reguler	49	Sri Handayani	Lansia
10	Umi Aty	Reguler	50	Ani	Reguler

⁷¹ Sapta , “Unit Pengeloa Program Keluarga Harapan “, Labuhan Maringgai, Lampung timur 2017

11	Jaisah	Lansia	51	Sumarti	Reguler
12	Jaimah	Reguler	52	Supatmi	Reguler
13	Umi kulsum	Reguler	53	Tini Kasih	Lansia
14	Wakini	Disabilitas	54	Kasma	Reguler
15	Siti Saropah	Reguler	55	Suparmi	Reguler
16	Sapriah	Reguler	56	Sugiarti	Reguler
17	Winariah	Reguler	57	Nursiami	Reguler
18	Sukarni Ati	Reguler	58	Sundari	Reguler
19	Rumanti	Reguler	59	Isniyati	Disabilitas
20	Rumiati	Reguler	60	Lasmini	Reguler
21	Sri Setiawati	Reguler	61	Suliya	Reguler
22	Ropiah	Reguler	62	Badriya	Lansia
23	Wasilah	Reguler	63	Dahlia	Reguler
24	Binti Zaenatun	Reguler	64	Paini	Lansia
25	Musriah	Reguler	65	Nafsia	Lansia
26	Sariatun	Reguler	66	Mujiyem	Lansia
27	Warianti	Reguler	67	Nurlena	Reguler
28	Jumiati	Lansia	68	Murtiya	Reguler
29	Sri rahayu	Reguler	69	Ismawati	Reguler
30	Maryaten	Reguler	70	Asima	Reguler
31	Wasirah	Reguler	71	Tina	Lansia
32	Zubaidah	Reguler	72	Jumatira	Lansia
33	Halimah	Reguler	73	Novi sarianti	Reguler
34	Siti Khotiah	Reguler	74	Mujiyem	Reguler
35	Kotipah	Reguler	75	Siti Alfiah	Lansia
36	Sri Indah Wahyuni	Reguler	76	Misirah	Reguler
37	Mini	Reguler	77	Uyik	Reguler
38	Sri Meswati	Reguler	78	Lilik	Reguler
39	Katminem	Lansia	79	Tumiem	Reguler
40	Mami	Lansia			

Sumber : dokumentasi pengolah program keluarga harapan

Dari data diatas adalah nama-nama masyarakat yang menerima program keluarga harapan (PKH) yang terdiri dari berbagai golongan pendidikan, kesehatan serta lansia umur diatas 70 tahun.

Berdasarkan tanya jawab ibu Mami salah satu peserta penerima PKH, menyatakan bahwa:

“sering dilakukan kunjungan dan penyuluhan dari pengelola program keluarga harapan ibu Sapta, tetapi saya belum mengerti apa itu PKH, karena ketika kumpulan/ penyuluhan banyak peserta yang tidak mendengarkan, suasanya pun kurang kondusif, serta kebijakan peserta penerima kurang karena masih ada yang tidak seharusnya menerima tetapi tetap menerima/ tidak tepat sasaran “.⁷²

Berdasarkan dari hasil Tanya jawab diatas dengan ibu Mami bahwa PKH di desa Kaya Makmur belum bisa dikatakan efektif, karena masih ada peserta penerima PKH yang tidak paham tentang arti/ tujuan dari PKH, sehingga pemanfaatannya pun kurang efektif dan efisien, dan masih ada peserta penerima PKH yang tidak tepat sasaran.

4. Karakteristik Responden

Pada bagian ini karakteristik responden yang akan dibahas adalah dimuali dari usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan utama responden. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat desa Karya Makmur dengan jumlah responden 79 orang.

a. Usia Responden

Usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 11
Usia Responden

No	Usia	Jumlah responden	Presntase
1	< 20 tahun	—	—
2	20 – 30 tahun	21	26,58 %
3	31 – 40 tahun	34	43,04 %

⁷² Tanya jawab ibu Mami, peserta Program Keluarga Harapan Desa Karya Makmur 2017

4	>41 tahun	24	30,38 %
Total		79	100 %

Sumber : data dari pengurus PKH

Berdasarkan table diatas dapat diketahuibahwa responden yang berusia kurang dari 20 tahun tidak ada, kemudian responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 21 orang atau 26,58 %, sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 34 orang atau 43,04%, dan responden yang berusia lebih/diatas 40 tahun berjumlah 24 orang atau 30,38%.

b. Berdasarkan Pekerjaan Responden

Berdasarkan pekerjaan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada table dibawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 12
Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	11	13,92 %
2	Petani	43	54,43 %
3	Buruh	9	11,40 %
4	Pedagang	16	20,25 %
Jumlah		79	100 %

Sumber : data hasil dari observasi

Berdasarkan data dari table diatas menunjukkan bahwa respnden yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebesar 11 oran atau 13,92 %, sedangkan responden yang berprofesi sebagai petani sebesar 43 orang atau 54,43 %, responden yang berprofesi sebagai buruh sebesar 9 orang

atau 11,40 %, dan responden yang berprofesi sebagai pedagang sebesar 16 orang atau 20,25 %.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 13
Jenis Pendidikan Responden

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1	Tidak Tamat SD	21	26,58 %
2	SD/ Sederajat	32	40,51 %
3	SMP/ Sederajat	19	24,05 %
4	SMA/ sederajat	7	8,86 %
Jumlah		79	100 %

Sumber : data diolah dari observasi peneliti

Pada tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan responden dengan tingkat pendidikan tidak lulus SD sebesar 21 orang atau 26,58%, responden dengan tingkat pendidikan SD sebesar 32 orang atau 40,51%, responden dengan tiningkat pendididkan SMP sebesar 19 orang atau 24,05%, dan tingkat pendidikan SMA/sederajat sebesar 7 orang atau 8,86%.

5. Hasil Koesioner Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Makmur

Untuk mengetahi efektivitas program keluarga harapan dalam mengkatkan kesejahteraan masyarakat desa karya makmur, perolehan data melalui kuesioner

sebanyak 34 pertanyaan untuk 79 responden, dari sebaran kuesioner dapat diperoleh hasil yang tergambar dibawah:

a. Efektivitas Program Keluarga Harapan

Dalam melihat efektivitas Program Keluarga Harapan ini, terdapat beberapa indikator yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

1) Indiator Masukan

Dalam indikator masukan membahas mengenai tersedianya dana, pedoman umum, alat sosialisasi, dan penetapan RTM. Maka dari itu, kita dapat melihat kuisisioner yang telah dilakukan dimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14
Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator Masukan

No	PERTANYAAN	YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mendapatkan informasi tentang KPH dari petugas PKH / pejabat desa ?	79	100%	-	0%
2	Apakah anda mendapatkan pedoman umum tentang PKH dari petugas PKH / pejabat desa?	79	100%	-	0%

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang menjawab "YA" pada pertanyaan diatas sebesar 79 responden atau sebesar 100%, sedang yang menjawab "TIDAK" sebesar nol/tidak ada baik dari segi informasi mengenai Program Keluarga Harapan maupun pedoman umum tentang program tersebut dari petugas. Hal ini menunjukkan jika secara keseluruhan penerima PKH mendapatkan informasi serta pedoman dari petugas maupun pejabat desa setempat.

2) Indikator Proses

Dalam indikator proses yang merupakan lanjutan dari langkah sebelumnya dimana dilakukan verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi yang dapat dilihat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 15
Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator Proses

No	PERTANYAAN	YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mendapatkan pendampingan yang baik dari pendamping PKH ?	79	100 %	-	0 %
2	Apakah ada verifikasi data dari petugas PKH?	79	100%	-	0 %
3	Apakah pendamping PKH mengadakan pertemuan rutin?	79	100%	-	0 %

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebesar 79 responden atau sebesar 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” sebesar nol/tidak ada. Hal ini artinya secara keseluruhan penerima PKH mendapatkan pendampingan langsung dari petugas terkait agar program tersebut berjalan sebagaimana mestinya, adanya verifikasi dari petugas PKH guna melihat kebenaran data yang ada dimana petugas melakukan pemerisaan untuk melihat apakah penerima layak menerima bantuan PKH atau untuk menghindari pemalsuan data, dan selalu ada pertemuan rutin yang diadakan oleh pendamping PKH pada kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan dari PKH itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan.

3) Indikator Keluaran

Dalam indikator keluaran yang berupa dilakukannya sosialisasi kepada RTM tentang mengertinya tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 16
Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator Keluaran

No	PERTANYAAN	YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah setelah diadakan sosialisasi rutin anda paham tujuan, hak-hak, dan kewajiban dari peserta PKH?	57	72,15%	22	27,85%
2	Apakah pencairan dana PKH tepat waktu?	79	100%	-	0%
3	Apakah dana yang anda terima sesuai dengan yang telah ditetapkan?	79	100%	-	0%

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” ini sebesar 57 responden atau sebesar 72,15% dalam penerima PKH yang memahami hak, tujuan, serta kewajiban setelah menerima bantuan sebesar sedangkan yang menjawab “TIDAK” sebesar 22 responden atau sebesar 27,85% dimana mereka belum memahaminya sehingga petugas harus memberikan pembinaan terhadap penerima PKH tersebut agar seluruhnya memahami. Kemudian mengenai untuk pencairan dana dan jumlah dana, sebanyak 100% responden menyatakan bahwa pencairan dana selalu tepat waktu dan dana tersebut sesuai dengan yang telah diterapkan.

4) Indikator Manfaat

Dalam indikator manfaat yang berupa pertanyaan mengenai dana PKH apakah diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, lansia, dan disabilitas atau tidak. Untuk itu, penggunaan dananya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17

Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator Manfaat

No	PERTANYAAN	YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah dana yang anda terima anda gunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebutuhan bagi lansia, dan disabilitas berat?	61	77,22%	18	22,78%

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Dari tabel diatas bahwa responden yang menjawab “IYA” dalam pertanyaan ini sebanyak 61 responden atau sebesar 77,22%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebesar 18 responden atau 22,78%. Hal ini menunjukkan jika dana yang diterima digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebutuhan lansia, dan disabilitas sebesar 77,22% dan sisanya yaitu sebanyak 22,78% digunakan untuk kebutuhan lain.

5) Indikator Dampak.

Dalam indikator dampak yang berupa ada atau tidaknya penyalahgunaan dana PKH dimana dana tersebut digunakan tidak

sesuai dengan tujuan. Untuk itu, penggunaan dananya dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 18

Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator dampak

No	PERTANYAAN	YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah setelah anda menerima dana PKH kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebutuhan lansia, dan disabilitas berat terpenuhi?	79	100%	-	100%
2	Apakah setelah anda menerima dana PKH kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat?	79	100%	-	100%

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Dari table diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebesar nol/tidak ada. Ini artinya, dana yang digunakan sesuai dengan tujuan bahwa terpenuhinya dan adanya peningkatan akan kebutuhan pendidikan, kesehatan, lansia, dan disabilitas.

b. Kesejahteraan Menurut BPS

Kesejahteraan menurut BPS dapat diukur melalui 14 indikator yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19

Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator Kesejahteraan

No	PERTANYAAN	SEBELUM	SESUDAH
----	------------	---------	---------

		YA	%	TIDAK	%	YA	%	TIDAK	%
1	Apakah luas rumah anda minimal 8m ² per orang?	58	73,42	21	26,58	58	73,42	21	26,58
2	Apakah rumah anda berlantaikan dari tanah/ bambu/ kayu murahan?	11	13,92	68	86,08	11	13,92	68	86,08
3	Apakah anda memiliki rumah dengan dinding minimal dari tembok?	63	79,75	16	20,25	63	79,75	16	20,25
4	Apakah anda memiliki toilet sendiri?	71	89,87	8	10,13	74	93,67	5	6,33
5	Apakah penerangan rumah anda menggunakan listrik?	73	92,41	6	7,59	76	96,20	3	3,80
6	Apakah sumber air minum anda dari sumur bor?	56	70,89	23	29,11	56	70,89	23	29,11
7	Apakah anda memasak menggunakan kompor gas?	63	79,75	16	20,25	71	89,87	8	10,13
8	Apakah anda mengkonsumsi daging/ susu/ ayam/ telur/ ikan minimal satu kali seminggu?	48	60,76	31	39,24	67	84,81	12	15,19
9	Apakah anda membeli satu stel pakaian baru minimal setahun sekali?	72	91,14	7	8,86	79	100	-	0
10	Apakah anda makan 3 kali dalam satu hari?	79	100	-	0	79	100	-	0
11	Apakah sumber penghasilan anda pertanian dengan	66	83,54	13	16,46	63	79,75	16	20,25

	lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan?								
12	Tidak sanggup membayar biasa puskesmas/poliklinik?	34	43,04	45	56,96	34	43,04	45	56,96
13	Apakah anda hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar atau tidak sama sekali?	53	67,09	26	32,91	53	67,09	26	32,91
14	Apakah anda memiliki tabungan ataupun motor?	37	46,84	42	53,16	56	70,89	23	29,11

Sumber: Data diolah dari hasil kuisioner.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam indicator pertama sebelum ada nya PKH sebesar 58 responden atau 73,42%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak 21 responden atau 26,58%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 58 responden atau 73,42%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 21 responden atau 26,58%.

Kemudian, untuk indikator kedua yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebesar 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak 68 responden atau 86,08%, dan sesudah adanya PKH yang

menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 68 responden atau 86,08%.

Indikator ketiga memperlihatkan responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 16 responden atau 20,25%.

Indikator keempat memperlihatkan responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 71 responden atau 89,87%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 8 responden atau 10,13%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 74 responden atau 93,67%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 5 responden atau 6,33%.

Kemudian, untuk indikator ke lima responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 73 responden atau 92,41%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 6 responden atau 7,59%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 76 responden atau 96,20%,

sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 3 responden atau 3,80%.

Selanjutnya, indikator keenam memperlihatkan responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 23 responden atau 29,11%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 23 responden atau 29,11%.

Untuk indikator ke tujuh, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 71 responden atau 89,87%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 8 responden atau 10,13%.

Indikator ke delapan memperlihatkan hasil kuisisioner kepada responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 48 responden atau 60,76%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 31 responden atau 39,24%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini

sebanyak 67 responden atau 84,81%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 12 responden atau 15,19%.

Untuk indikator selanjutnya yaitu indikator kesembilan memperlihatkan responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 72 responden atau 91,14%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 7 responden atau 8,86%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada.

Indikator ke sepuluh menunjukkan jika responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak nol/tidak ada, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada.

Indikator kesebelas memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 34 responden atau 43,04%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 45 responden atau 56,96%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 68 responden atau 86,08%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 11 responden atau 13,92%.

Indikator ke dua belas memperlihatkan responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sesudah adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sebelum adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 66 responden atau 83,54%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 13 responden atau 16,46%.

Selanjutnya indikator ke tiga belas terlihat responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 53 responden atau 67,09%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 26 responden atau 32,91%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 53 responden atau 67,09%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 26 responden atau 32,91%.

Kemudian, untuk indikator terakhir dari kesejahteraan menurut BPS menunjukkan responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 37 responden atau 46,84%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 42 responden atau 53,16%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 23 responden atau 29,11%.

c. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan dinilai dari 3 kebutuhan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Kebutuhan Ad-Dharuriyat**

Ad-Dharuriyat ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum yang mana kita dapat melihatnya dalam tabel berikut:

Tabel 20
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kebutuhan Ad-Dharuriyat

No	PERTANYAAN	SEBELUM				SESUDAH			
		YA		TIDAK		YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda makan 3 kali sehari?	79	100	-	0	79	100	-	0
2	Apakah anda memiliki tempat tinggal yang nyaman?	79	100	-	0	79	100	-	0
3	Apakah anda memakai pakaian yang layak?	76	96,20	3	3,80	79	100	-	0
4	Apakah anda memiliki penghasilan tetap?	63	79,75	16	20,25	63	79,7	16	20,25

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Dari table diatas dapat dilihat untuk pertanyaan pertama bahwa responden yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH

sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak nol/tidak ada, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada.

Kemudian, untuk pertanyaan kedua responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak nol/tidak ada, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada.

Selanjutnya, pertanyaan ketiga responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 76 responden atau 96,20%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 3 responden atau 3,80%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada

Kemudian pertanyaan keempat, responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab

“YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 16 responden atau 20,25%.

2) Kebutuhan Al-Hijayati

Al-Hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan dan lain sebagainya yang pertanyaanya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 21
Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator *Al-Hijayati*

No	PERTANYAAN	SEBELUM				SESUDAH			
		YA		TIDAK		YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah penerangan rumah anda listrik/PLN?	73	92,41	6	7,59	76	96,20	3	3,80
2	Apakah akses jalan yang baik?	67	84,81	12	15,19	67	84,81	12	15,19

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Dari table diatas dapat dilihat bahwa responden yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebesar 73 responden atau 92,42%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak 6 responden atau 7,59%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 76 responden atau 96,20%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 3 responden atau 3,80%.

Selanjutnya, untuk kuisisioner ketiga dapat dilihat bahwa pertanyaan pada

kuisisioner pertama, responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 67 responden atau 84,81%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 12 responden atau 15,19%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 67 responden atau 84,81%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 12 responden atau 15,19%.

3) Kebutuhan Tahsiyat

Tahsiniyat atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia dimana pertanyaannya atau kuisisionernya dapat dilihat sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Tabel 22
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kbutuhan Tahsiniyat

No	PERTANYAAN	SEBELUM				SESUDAH			
		YA		TIDAK		YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda memiliki tabungan?	37	46,84	42	53,16	56	70,89	23	29,11
2	Apakah anda sudah menunaikan ibadah umroh ataupun haji?	11	13,92	68	86,08	11	13,92	68	86,08
3	Apakah anda sudah nyaman lahir dan batin?	63	79,75	16	20,25	71	89,87	8	10,13

Sumber : data diolah dari hasil kuesioner tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan kuisiner pertama yang memperlihatkan bahwa responden yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebesar 37 responden atau 46,84%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak 42 responden atau 53,16%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 23 responden atau 29,11%.

Kemudian, kuisiner kedua memperlihatkan bahwa responden yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebesar 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak 68 responden atau 86,08%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 68 responden atau 86,08%.

Selanjutnya, kuisiner ketiga dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 71 responden atau 89,87%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 8 responden atau 10,13%.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegar agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya”.⁷³

Program keluarga harapan ini memfokuskan pada dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak RTM) dan kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun. seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Menurut teori *human capital* kualitas sumber daya manusia renda dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh karena itu, hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

Dalam hal ini untuk tercapainya kesuksesan PKH disuatu daerah harus memenuhi indicator efektivitas tercapainya PKH, berikut ini peneliti akan

⁷³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.pasal 1 ayat 1

menguraikan hasil temuan lapangan efektivitas PKH berdasarkan pengukuran lima indikator efektivitas PKH sebagai berikut:

1. Indikator masukan (tersedianya dana, pedoman umum, alat sosialisasi, penetapan RTM)

Berdasarkan hasil kuesioner pada peserta PKH, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 14 diketahui bahwa responden yang menjawab "YA" pada dua pertanyaan diatas sebesar 79 responden atau sebesar 100%, sedang yang menjawab "TIDAK" sebesar nol/tidak ada. Hal ini menunjukkan jika secara keseluruhan penerima PKH mendapatkan informasi dan telah mendapatkan pedoman umum tentang PKH itu sendiri yang didapat dari petugas PKH maupun pejabat desa setempat dimana artinya tidak ada satupun penerima PKH yang tidak mengetahui informasi maupun pedoman umum PKH. Ini artinya dari indikator masukan sudah berjalan dengan efektif di desa karya makmur

2. Indikator *proses*, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.

Dari tabel 15 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab "YA" dalam pertanyaan seluruh pertanyaan yang totalnya tiga pertanyaan, sebesar 79 responden atau sebesar 100%, sedangkan yang menjawab "TIDAK" sebesar nol/tidak ada. Hal ini artinya secara keseluruhan penerima PKH mendapatkan pendampingan langsung dari

petugas terkait agar program tersebut berjalan sebagaimana mestinya, adanya kebenaran data yang ada dimana petugas melakukan pemerisaan untuk melihat apakah penerima layak menerima bantuan PKH atau untuk menghindari pemalsuan data, dan pertemuan rutin selalu diadakan oleh pendamping PKH pada kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan dari PKH itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa indikator proses sudah efektif karena dari 3 pertanyaan kuesioner tentang indikator proses ini sudah berjalan cukup baik.

3. Indikator *keluaran*, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.

Dari table 16 diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pada pertanyaan pertama sebesar 57 responden atau sebesar 72,15%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebesar 22 responden atau sebesar 27,85%. Hal ini menunjukkan jika sebagian besar penerima PKH memahami hak, tujuan, serta kewajiban setelah menerima bantuan PKH namun masih ada sebesar 27,85% yang belum memahaminya sehingga petugas harus memberikan pembinaan terhadap penerima PKH tersebut agar seluruhnya memahami. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebesar 79 responden atau sebesar 100%, sedangkan yang

menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebesar nol atau tidak ada yang artinya pencairan dana selalu tepat waktu dan dana yang diterima sesuai dengan dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan dengan semestinya jika dilihat dari jawaban responden diatas.

4. Indikator *manfaat*, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.

Dari table 17 menyatakan bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 61 responden atau sebesar 77,22%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebesar 18 responden atau 22,78%. Ini artinya lebih dari setengah penerima bantuan PKH menggunakan dana tersebut untuk pendidikan, kesehatan, kebutuhan bagi lansia, dan disabilitas berat. Sedangkan untuk 22,78% nya digunakan untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan sehari-hari atau pembelian barang tertentu dikarenakan masih kurangnya pemahaman mengenai program ini.

5. Indikator *dampak*.

Indikator ini merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.

Dari table 18 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebesar nol/tidak ada. Dimana menunjukkan bahwa dana PKH ini telah digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebutuhan lansia maupun disabilitas terpenuhi walaupun ada kalanya sisa dana PKH digunakan untuk kebutuhan lain namun yang pokok sudah terpenuhi. Hal ini karena dilapangan, petugas PKH memberikan pemahaman bagaimana kualitas pendidikan dan kesehatan menentukan kehidupan masyarakat dimasa mendatang dimana sebelumnya banyak warga yang jika sakit memilih obat-obatan tradisional dan tidak datang ke puskesmas maupun dokter namun setelah adanya PKH, banyak warga yang paham perlunya berobat pada dokter. Mereka juga diberikan pemahaman serta telah menerapkannya untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, pola hidup yang sehat, dan hal-hal lain yang menunjang kesehatan mereka sendiri. Kemudian, dalam kualitas pendidikan, penerima PKH paham akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka dan menggunakan dana tersebut untuk membantu pendidikan anak agar setidaknya mereka mengikuti program wajib belajar bahkan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara umum program keluarga harapan sudah berjalan secara efektif hal ini dilihat dari lima indikator efektivitas program keluarga harapan hanya ada dua indikator yang kurang efektif dikarenakan masih

ada responden yang menjawab tidak, yaitu indikator keluaran dan indikator manfaat.

B. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan menurut BPS untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera dapat diukur melalui 14 indikator, berikut ini adalah hasil jawaban responden mengenai indikator kesejahteraan menurut BPS:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang

Dari table 19 pertanyaan nomor 1 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 58 responden atau 73,42%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 21 responden atau 26,58%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 58 responden atau 73,42%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 21 responden atau 26,58%. Menurut BPS sendiri, luas rumah jika sudah 8m² atau di atasnya dapat dikatakan sejahtera sedangkan 73,42% penerima PKH memiliki luas tanah sebesar angka tersebut bahkan lebih yang artinya jika melihat ketentuan sejahtera menurut BPS, mereka termasuk golongan yang tidak berhak menerimanya.

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

Dari table 19 pertanyaan nomor 2 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 68 responden atau 86,08%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 68 responden atau 86,08% dimana artinya baik sesudah maupun sebelum adanya PKH tidak ada perubahan untuk jenis lantai untuk rumah penerima PKH.

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester

Dari table 19 pertanyaan nomor 3 diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 16 responden atau 20,25%. Hal ini menunjukkan tidak adanya perubahan untuk dinding rumah karena dana tersebut memang ditujukan untuk hal-hal yang lebih pokok dibandingkan untuk perbaikan rumah menjadi lebih mewah namun seharusnya untuk kepemilikan rumah dengan dinding berupa anyaman bambu (*geribik*) atau papan ada perhatian tersendiri.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain

Dari table 19 pertanyaan nomor 4 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 71 responden atau 89,87%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 8 responden atau 10,13%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 74 responden atau 93,67%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 5 responden atau 6,33%. Ini menunjukkan adanya perubahan kepemilikan toilet sendiri setelah adanya bantuan dari petugas PKH yang memberikan pemahaman. Ada sebagian kecil warga yang berusaha menabung baik dari usahanya atau menyisihkan sebagian kecil dana PKH untuk membangun toilet dirumahnya karena kepemilikan toilet pribadi akan lebih menjaga kesehatan dimana bertambah 3 orang memiliki toilet sendiri setelah adanya program PKH. Sedangkan penerima PKH yang belum memiliki toilet tersisa 5 rumah lagi dan mereka masih berusaha mengumpulkan dana dengan ditabung agar dapat membuat toilet dirumahnya sendiri guna meningkatkan kesehatan.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

Dari table 19 pertanyaan nomor 5 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 73 responden atau 92,41%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam

pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 6 responden atau 7,59%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 76 responden atau 96,20%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 3 responden atau 3,80%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya PKH dan pendampingan dari petugas PKH sendiri, penerima PKH mengerti akan pentingnya kepemilikan listrik baik untuk kegiatan sehari-hari, pendidikan anak, maupun hal-hal lainnya yang mana ditabel menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan

Dari tabel 19 pertanyaan nomor 6 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 23 responden atau 29,11%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 23 responden atau 29,11%. Hal ini menunjukkan tidak ada peningkatan dari jenis sumur atau sumber air baik sebelum maupun sesudah menerima PKH.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah

Dari tabel 19 pertanyaan nomor 7 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 71 responden atau 89,87%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 8 responden atau 10,13%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan penggunaan kompor dari tradisional ke kompor gas karena mereka sudah mampu untuk membeli gas dari dana PKH maupun dari hasil kerja keras mereka sendiri dimana tingkat kesejahteraan disini diukur melalui kepemilikan kompor gas

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/telur/ikan dalam satu kali seminggu

Dari tabel 19, pertanyaan nomor 8 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 48 responden atau 60,76%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 31 responden atau 39,24%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 67 responden atau 84,81%, sedangkan yang

menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 12 responden atau 15,19%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari konsumsi daging/susu/ayam/telur/ikan setelah mereka menerima dana PKH.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

Dari tabel 19, pertanyaan nomor 9 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 72 responden atau 91,14%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 7 responden atau 8,86%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada. Hal ini menunjukkan jika adanya perubahan yang tinggi karena setelah adanya dana PKH, keseluruhan penerima PKH mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang atau setidaknya membeli pakaian baru dalam kurun waktu satu tahun sekali.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari

Dari tabel 19, pertanyaan nomor 10 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak nol/tidak ada, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang

menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan berupa pangan yang sangat dasar walaupun sebagian hanya dengan makanan yang sederhana.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/ poliklinik

Dari tabel 19, pertanyaan nomor 11 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 34 responden atau 43,04%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 45 responden atau 56,96%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 68 responden atau 86,08%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 11 responden atau 13,92%. Melihat hal tersebut menunjukkan adanya perubahan mengenai pentingnya kesehatan setelah adanya program PKH sehingga jika ada keluarga yang sakit dibawa ke puskesmas terdekat.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan

Dari tabel 19, pertanyaan nomor 12 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16

responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 66 responden atau 83,54%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 13 responden atau 16,46%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pendapatan penerima PKH karena ada yang menggunakan data tersebut untuk usaha.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

Dari tabel 19, pertanyaan nomor 13 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 53 responden atau 67,09%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 26 responden atau 32,91%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 53 responden atau 67,09%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 26 responden atau 32,91%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penerima PKH hanya menyelesaikan pendidikannya sebatas Sekolah Dasar (SD) dan ada yang tidak tamat SD sedangkan yang mengenyam jenjang pendidikan lebih tinggi dari Sekolah Dasar (SD) hanya sebesar 32,91 % baik setelah maupun sebelum adanya PKH sehingga tidak ada perubahan kecuali pada anak-anak mereka.

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dari tabel 19, pertanyaan nomor 14 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 37 responden atau 46,84%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 42 responden atau 53,16%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 23 responden atau 29,11%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan setelah adanya dana PKH dimana dilapangan sendiri penerima PKH memilih uangnya disisihkan untuk ditabung yang akan digunakan dimasa akan datang atau kebutuhan mendadak lainnya.

Lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 23

Indikator	SEBELUM					SESUDAH				
	Ya		Tidak		Total %	Ya		Tidak		Total %
	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	58	73,42	21	26,58	100%	58	73,42	21	26,58	100%
2	11	13,92	68	86,08	100%	11	13,92	68	86,08	100%
3	63	79,75	16	20,25	100%	63	79,75	16	20,25	100%
4	71	89,87	8	10,13	100%	74	93,67	5	6,33	100%
5	73	92,41	6	7,59	100%	76	96,20	3	3,80	100%
6	56	70,89	23	29,11	100%	56	70,89	23	29,11	100%
7	63	79,75	16	20,25	100%	71	89,87	8	10,13	100%

8	48	60,76	31	39,24	100%	67	84,81	12	15,19	100%
9	72	91,14	7	8,86	100%	79	100	0	0	100%
10	79	100	0	0	100%	79	100	0	0	100%
11	34	43,04	45	56,96	100%	68	86,08	11	13,92	100%
12	63	79,75	16	20,25	100%	66	83,45	13	16,46	100%
13	53	67,09	26	32,91	100%	53	67,09	26	32,91	100%
14	37	46,84	42	53,16	100%	56	70,89	23	29,11	100%

Indikator Kesejahteraan Menurut Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, efektivitas Program Keluarga Harapan di desa karya makmur belum efektif dan belum sejahtera. Hal ini dikarenakan sebelum adanya PKH dengan sesudah adanya PKH kurang dari 9 indikator kesejahteraan yang terpenuhi sedangkan masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila lebih dari 9 indikator terpenuhi. Hal ini dapat kita perhatikan pada tabel diatas bahwa hampir secara keseluruhan responden menjawab 'YA' diatas 50%. Indikator yang mengalami peningkatan yaitu indicator 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, dan 14. Sedangkan sisanya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Ini karena petugas PKH dan pejabat desa setempat memberikan pengetahuan baik mengenai program ini, kewajiban, serta hak para penerima PKH dimana dilakukan dengan cara pendampingan langsung secara rutin namun kenyataannya tidak semua indicator terpenuhi sehingga masyarakat dikatakan belum sejahtera setelah adanya program ini.

Setelah program ini berjalan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, lansia, dan disabilitas sebagian telah terpenuhi dimana terlihat adanya peningkatan dari segi kualitas terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Selain itu, adanya pendampingan langsung dari petugas PKH membuat

penerima PKH sadar akan pentingnya kesehatan dan pendidikan karena hal ini dirasa yang paling utama di desa Karya Makmur. Sehingga secara keseluruhan, program ini sudah cukup berjalan dengan baik namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan perlu adanya perbaikan karena ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi seperti perbaikan atau peningkatan kepemilikan toilet dirumah sendiri serta adanya pembinaan untuk meningkatkan penghasilan per bulan para penerima PKH dengan mengarahkan uang tersebut selain untuk hal pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya tapi juga untuk hal-hal yang produktif. Akan tetapi, jika melihat lagi indicator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik ada penerima dana PKH yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran dikarenakan penerima sudah masuk ke golongan yang sejahtera sehingga perlu adanya perbaikan dalam pemberian dana PKH serta melihat kebenaran data walaupun keluarga kurang mampu menurut BPS dan Dinas Sosial memiliki perbedaan namun ada baiknya diperhatikan lagi.

C. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karya Makmur Perspektif Ekonomi Islam

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, Pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus di tanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan jaminan sosial. Tanggung jawab pemerintah Indonesia pada rakyatnya tercermin pada diberlakukannya perlindungan sosial dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini. Program terbaru perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2007. PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH.

Dalam Islam agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzoliman dan arogansi. Dalam implementasinya PKH dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai-

nilai dasar Ekonomi Islam adalah dimana dalam permasalahan ini lebih mengacu pada meningkatkan kesejahteraan.

Islam sendiri sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini PKH di desa Karya Makmur belum menjunjung tinggi kesejahteraan yang merata dikarenakan masih adanya nepotisme dalam penentuan penerima dana PKH.

Kesejahteraan yang merata wajib menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nahl ayat 90:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa: Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya

untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT.

Pada surat An-Nahl ayat 90 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Perlindungan sosial bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah. Dalam Prakteknya dilapangan, hasil kuisisioner yang diberikan kepada seluruh penerima PKH dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 24

Kebutuhan Ad-Dharuriyat, Al-Hijayati, dan Tahsiniyat

Ad-Dharuriyat									
No	PERTANYAAN	SEBELUM				SESUDAH			
		YA		TIDAK		YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda makan 3 kali sehari?	79	0	-	-	79	100	-	0
2	Apakah anda memiliki tempat tinggal yang nyaman?	79	0	-	-	79	100	-	0
3	Apakah anda memakai pakaian yang layak?	76	96,20	3	3,80	79	100	-	0
4	Apakah anda memiliki penghasilan tetap?	63	79,75	16	20,25	63	79,7	16	20,25

Al-Hijayati									
No	PERTANYAAN	SEBELUM				SESUDAH			
		YA		TIDAK		YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah penerangan rumah anda listrik/PLN?	73	92,41	6	7,59	76	96,20	3	3,80
2	Apakah akses jalan yang baik?	67	84,81	12	15,19	67	84,81	12	15,19
Tahsiniyat									
No	PERTANYAAN	SEBELUM				SESUDAH			
		YA		TIDAK		YA		TIDAK	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda memiliki tabungan?	37	46,84	42	53,16	56	70,89	23	29,11
2	Apakah anda sudah menunaikan ibadah umroh ataupun haji?	11	13,92	68	86,08	11	13,92	68	86,08
3	Apakah anda sudah nyaman lahir dan batin?	63	79,75	16	20,25	71	89,87	8	10,13

1. *Ad-Dharuriyat* ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum

Dari tabel 20 pertanyaan pertama, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak nol/tidak ada, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada. Menurut Ekonomi Islam

sendiri, sejahtera salah satunya *Ad-Dharuriyat* ialah kebutuhan pokok (Ad-Dharuriyat) seperti kebutuhan pangan yang mana pada table diatas menunjukkan pemenuhan untuk kebutuhan pangan penerima PKH itu sendiri. Dari table 7 pertanyaan kedua, dapat dilihat bahwa responden yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebesar 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak nol/tidak ada, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada. Dalam ekonomi Islam sendiri seperti *Ad-Dharuriyat* ialah kebutuhan pokok (Ad-Dharuriyat) berupa papan atau tempat tinggal yang sudah seluruhnya terpenuhi atau masuk ke dalam golongan sejahtera. Dari tabel 7 pertanyaan ketiga, dapat dilihat bahwa responden yang mnjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebesar 76 responden atau 96,20%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum ada nya PKH sebanyak 3 responden atau 3,80%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 79 responden atau 100%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar nol/tidak ada. Hal ini sesuai dengan ekonomi Islam yaitu *Ad-Dharuriyat* ialah kebutuhan pokok (Ad-Dharuriyat) yang salah satunya kebutuhan sandang (pakaian) dimana sebelum adanya PKH ada sebanyak 3,80% yang tidak terpenuhi kebutuhan sandang yang layak namun setelah adanya PKH hampir

keseluruhan layak. Dari table 7 pertanyaan keempat, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 16 responden atau 20,25%. Menurut Ekonomi Islam *Ad-Dharuriyat* ialah kebutuhan pokok (*Ad-Dharuriyat*) yang salah satunya penghasilan tetap menunjukkan table diatas sudah cukup baik karena 79,75% memiliki penghasilan tetap namun baik sebelum ataupun sesudah adanya PKH, tidak ada peningkatan sehingga masih perlu adanya perbaikan-perbaikan program ini. Dari seluruh pertanyaan dalam *Ad-Dharuriyat*, hanya pertanyaan nomor 3 yang mengalami peningkatan yaitu mengenai pakaian yang layak pakai sedangkan sisanya tidak mengalami peningkatan sama sekali.

2. *Al-Hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan dan lain sebagainya

Dari tabel 21 pertanyaan pertama, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 73 responden atau 92,42%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 6 responden atau 7,59%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini

sebanyak 76 responden atau 96,20%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 3 responden atau 3,80%. Dalam Ekonomi Islam, *Al-Hajiyat* yang merupakan kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan sudah sesuai bahkan baik karena adanya peningkatan namun belum baik secara keseluruhan karena masih ada sebagian kecil yang tidak menerima penerangan. Dari tabel 8 pertanyaan kedua, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 67 responden atau 84,81%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 12 responden atau 15,19%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 67 responden atau 84,81%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 12 responden atau 15,19%. Dalam Ekonomi Islam, *Al-Hajiyat* yang merupakan kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan akses jalan yang menurut tabel belum sepenuhnya baik karena dilapangan sendiri ditemukan akses jalan yang sulit seperti masih berupa jalanan berpasir dan berbatu yang sulit dijangkau. Dari dua pertanyaan dalam *Al-Hijayati*, hanya pertanyaan pertama tentang penerangan PLN yang mengalami peningkatan sedangkan pertanyaan kedua tentang akses jalan tidak mengalami peningkatan.

3. *Tahsiniyat* atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu

kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia

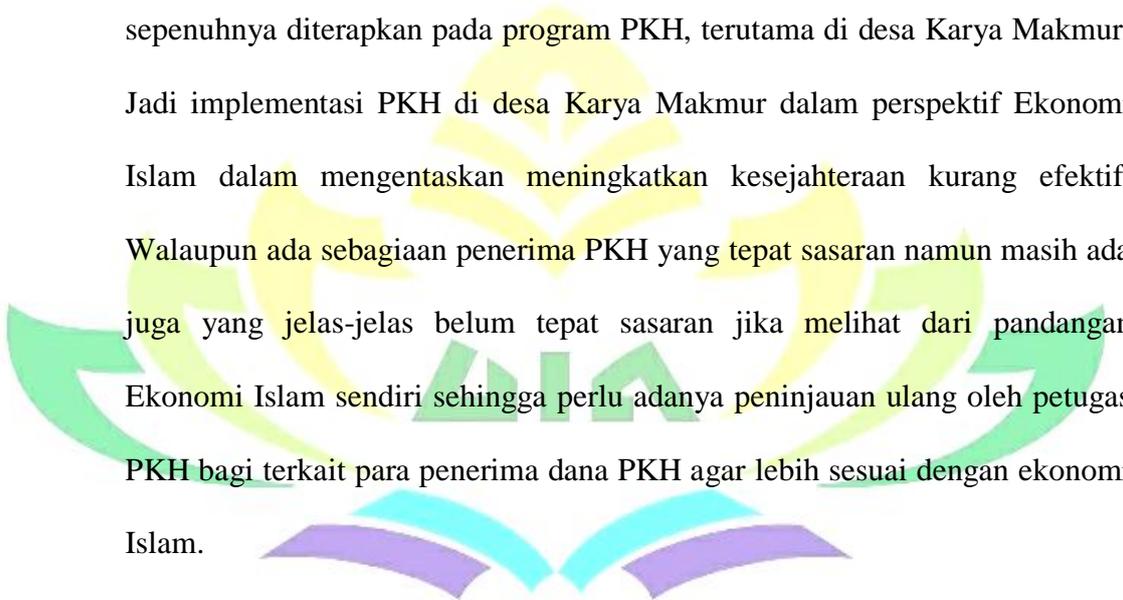
Dari table 22 pertanyaan pertama, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 37 responden atau 46,84%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 42 responden atau 53,16%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 56 responden atau 70,89%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 23 responden atau 29,11%. Dalam Ekonomi Islam, *Tahsiniyat* sendiri bahwa adanya PKH ini sudah cukup membantu dikarenakan dapat memberikan kesejahteraan dari kebutuhan pelengkap berupa tabungan dan adanya peningkatan setelah adanya PKH namun masalahnya disini adalah penerima PKH yang sejak awal sudah memiliki tabungan tapi tetap mendapatkan dana PKH dimana bahkan pada lapangan, tabungan mereka sudah lebih dari cukup untuk tidak menerima bantuan. Dari tabel 9 pertanyaan kedua dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 68 responden atau 86,08%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 11 responden atau 13,92%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 68 responden atau 86,08%. Dalam Ekonomi Islam, *Tahsiniyat*

berupa ibadah haji/umroh tidak terpenuhi karena tidak adanya peningkatan untuk melakukan ibadah haji maupun umroh sesudah menerima dana PKH. Dari tabel 9 pertanyaan nomor tiga, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebesar 63 responden atau 79,75%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” dalam pertanyaan ini sebelum adanya PKH sebanyak 16 responden atau 20,25%, dan sesudah adanya PKH yang menjawab “YA” dalam pertanyaan ini sebanyak 71 responden atau 89,87%, sedangkan yang menjawab “TIDAK” setelah adanya PKH sebesar 8 responden atau 10,13%. Menurut Ekonomi Islam, *Tahsiniyat* yang salah satunya kesenangan lahir batin sudah cukup baik apalagi setelah adanya PKH meningkat. Hal ini karena baik kebutuhan sandang, pangan, papan yang terpenuhi juga kebutuhan batin atau rasa cinta kasih sayang terpenuhi karena tidak atau berkurangnya konflik akibat himpitan ekonomi. Dari ketiga pertanyaan yang mengalami peningkatan yaitu pertanyaan pertama dan ketiga yaitu tentang kepemilikan tabungan dan bahagia lahir-batin sedangkan untuk haji-umroh tidak mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PKH dalam Ekonomi Islam yang mana implementasinya di desa Karya Makmur kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan ada sebagian masyarakat yang mampu misalkan yang mampu menunaikan ibadah haji atau umroh dengan biaya sendiri justru mendapatkan bantuan, tempat tinggal yang lebih dari sekedar layak, serta adanya

kepemilikan tabungan yang cukup besar dirasa tidak tepat jika mereka adalah penerima dana PKH.

Hal ini menunjukkan bahwa penerima PKH sudah tepat sasaran belum sepenuhnya diterapkan pada program PKH, terutama di desa Karya Makmur. Jadi implementasi PKH di desa Karya Makmur dalam perspektif Ekonomi Islam dalam mengentaskan meningkatkan kesejahteraan kurang efektif. Walaupun ada sebagian penerima PKH yang tepat sasaran namun masih ada juga yang jelas-jelas belum tepat sasaran jika melihat dari pandangan Ekonomi Islam sendiri sehingga perlu adanya peninjauan ulang oleh petugas PKH bagi terkait para penerima dana PKH agar lebih sesuai dengan ekonomi Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian tentang ‘Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur), dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan lima indikator efektivitas Program Keluarga Harapan dapat disimpulkan bahwasanya seluruh indikator sudah berjalan dengan efektif kecuali indikator keluaran dan indikator manfaat yang belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.
2. Program Keluarga Harapan kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat kecilnya perubahan atau peningkatan kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya Program Keluarga Harapan serta tidak terpenuhinya seluruh indikator kesejahteraan atau setidaknya 9 dari 14 indikator terpenuhi namun pada penelitian ini tidak terpenuhi.
3. Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan dapat memenuhi kebutuhan Ad-Dharuriyat, Al-Hijayati, dan Tahsiniyat dimana dari semua kebutuhan selain terpenuhi, juga ada peningkatan.

B. SARAN

1. Bagi pengelola Program Keluarga Harapan (desa Karya makmur, kec. Labuhan Maringgai kabupaten lampung Timur) diharapkan lebih memperhatikan penggunaan dana yang diberikan kepada penerima PKH atau peserta PKH supaya tidak ada penyalah gunnaan dari dana yang diberikan.
2. Penerima atau peserta Program Keluarga Harapan (desa Karya Makmur, kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)
 - a. Penerima atau peserta Program Keluarga Harapan diharapkan lebih memahami tujuan, hak- hak, dan kewajiban bagi penerima atau peserta PKH.
 - b. Penerima atau peserta program keluarga harapan diharapkan lebih bijak dalam menggunakan dana yang diterima agar pemanfaatan sesuai dengan tujuan diadakannya program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Terjemah Soeroyo, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000)
- Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah, STAIN Kudus, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/, diakses pada (Jum'at, 12 Mei 2017 Pukul 22:30 WIB)
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2014)
- Claudio Usman, *Efektifitas program keluarga harapan dalam rangka penanggulangan kemiskinan* (Gorontalo, jurnal administrasi public, 2014)
- Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Dadang Kurniawan, *Pendidikan Orang Tua Pada Anak: Telaah Pada Al-quran Surat An-Nisa : 9 dan At-Tahrim: 6*, (Skripsi Program Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet IV), (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011)
- Data profil desa karya makmur kec. Labuhan maringgai 2016
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Hartomo Dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)
- Herry Hikmat, M.Si, *Kebijakan pelaksanaan program keluarga harapan* (Padang, 2017)
- Hendrik, *Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Bawah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Riau*, Jurnal Perikanan dan Kelautan, 20 Mei 2011, diakses pada 11 Maret 2017,
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)

- Herien Puspita, *Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga*, (Bogor: PT.IPB Press, 2012)
- Igusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metedologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, Edisi1)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Kemensos, 2012)
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2010)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Terjemahan Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P33EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Sapta, "Unit Pengelola Program Keluarga Harapan," *Labuhan Maringgai, Lampung Timur 2017*.
- Soetomo, *Stratego-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet. 19, 2014)
- Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2013)
- Sumber, *UPPKH- Kemensos, 2014*
- Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991),
- T. Gilarso, *Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986)
- Tim Nasional Percepatan Pembangunan, *Program Keluarga Harapan* (Jakarta: TNP2K, 2012)

TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017)

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, BAB II Pasal 25,
Diunduh melalui: <http://dapp.bappenas.go.id>, pada Tanggal 27 Januari 2017,
pukul 14.30 WIB

Usman Yatim, *Zakat Dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992)

Yudi Firmansyah, *Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan dikaji dari Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Of Islamic Education Management*, Juni 2016 Vol. 2 No. 1, pp 141-160 (29 Januari 2017)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG